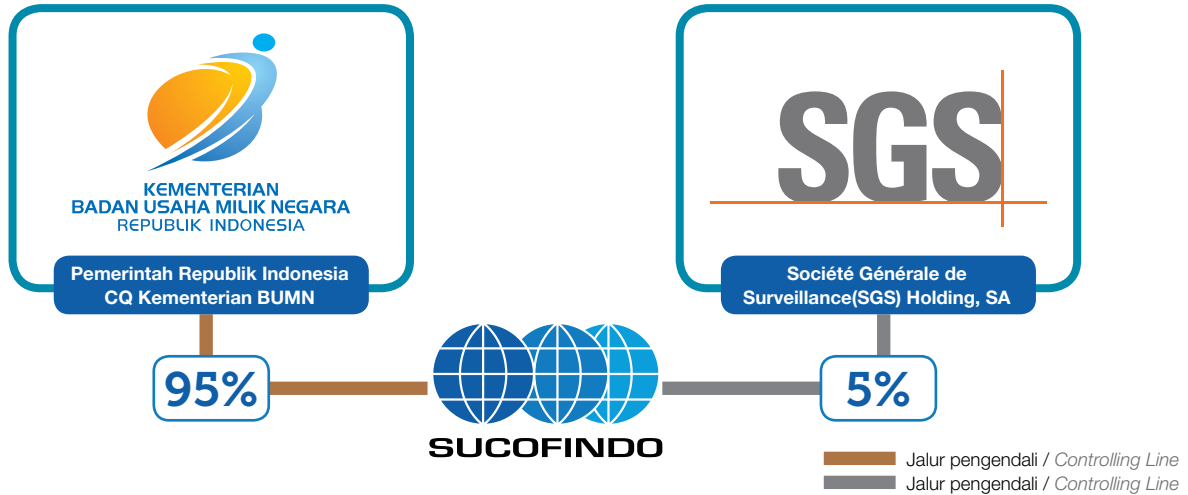




Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholders' Structure and Composition

g Saham
position



Komposisi Kepemilikan Saham Berdasarkan Status Kepemilikan

Shareholders' Composition Based on Ownership Status

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Harga Nominal Saham Nominal Value of Shares	Persentase Kepemilikan Percent of Ownership
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	285.000	Rp285.000.000.000,00	95%
SGS	15.000	Rp15.000.000.000,00	5%
Total	300.000	Rp300.000.000.000,00	100%

Kepemilikan Saham Lebih Dari 5%

Shareholders with more than 5% ownership

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Harga Nominal Saham Nominal Value of Shares	Persentase Kepemilikan Percent of Ownership
Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic of Indonesia	285.000	Rp285.000.000.000,00	95%
Total	285.000	Rp285.000.000.000,00	95%

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris SUCOFINDO tidak memiliki saham di SUCOFINDO.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pada 31 Desember 2020, Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian BUMN yang menguasai 95% saham Perseroan merupakan pemegang saham utama sekaligus pemegang saham pengendali.

Share Ownership by Directors and Board of Commissioners

No members of the Board of Directors and Board of Commissioners of SUCOFINDO own shares in SUCOFINDO.

Majority and Controlling Shareholder

On December 31, 2020, the Government of the Republic of Indonesia, CQ Ministry of SOEs controls 95% of the Company's shares, is and is the majority and controlling shareholder of SUCOFINDO



Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Shareholders' Structure and Composition

PROFIL PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Profile of the Controlling Shareholder

Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Ministry of State Owned Enterprises



Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Ministry of State Owned Enterprises

Alamat :
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678
Fax. 021-29935740

Address :
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia
Telp. 021-29935678
Fax. 021-29935740

Kepengurusan
Management

Menteri : Erick Thohir
Wakil Menteri : Kartika Wirjoatmodjo dan Pahala Nugraha Mansury
Sekretaris : Susyanto

Minister : Erick Thohir
Deputy Minister : Kartika Wirjoatmodjo
Pahala Nugraha Mansury
Secretary : Susyanto

Riwayat Singkat
Brief History

Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.

The Ministry of SOEs is a transformation from the Finance Department echelon II work unit (1973-1993) that later became an echelon I work unit (1993-1998 and 2000-2001). In 1998-2000 and 2001 until now, this work unit became the Ministry of BUMN.

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

As the role, function and contribution of SOEs to state finances was very significant, in 1998 the Indonesian government changed the BUMN supervisory and management organizations to a ministerial level. The change from an organization to a ministry occurred during the time of the Development VI Cabinet, under the name "Office of the State Minister for Investment and Development of BUMN / Head of the BUMN Development Agency". In 2009, following a change in nomenclature for all ministries, this ministry become the Ministry of State-Owned Enterprises.

Tugas dan Fungsi
Duties and Functions

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BUMN, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

The Ministry of BUMN is tasked with carrying out government affairs in the field of State-Owned Enterprises, hereinafter referred to in this Ministerial Regulation as BUMN, to assist the President in carrying out state governance. Assisting these state-owned enterprises includes fostering entities controlled by the BUMN, either directly or indirectly in accordance with the provisions for carrying out their duties as referred to in Article 2, the Ministry of BUMN carries out the following functions:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kementerian BUMN;
4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kementerian BUMN; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

1. Formulating and determining policies in the field of strategic business initiative formulation, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth, restructuring, business development, and increasing the capacity of the BUMN business infrastructure;
2. Coordinating and synchronizing policy implementation in the field of strategic business initiative formulation, strengthening competitiveness and synergy, strengthening performance, creating sustainable growth, restructuring, business development, and increasing the capacity of BUMN business infrastructure;
3. Coordinating the tasks, guidance and provision of administrative support within the Ministry of BUMN;
4. Managing state property under the responsibility of the Ministry of BUMN; and
5. Supervising the duties within the Ministry of BUMN.